

GERAKAN TRANSNASIONAL HIZBUT TAHRIR INDONESIA: TANTANGAN BAGI IDEOLOGI PANCASILA

Nabila Kheisya Zalvadhia¹, Silvia Nuraeni², Caritas Nadya Anisti³, Kezia Marlinata Sinaga⁴, Fatkhuri⁵, Mukhamad Busro Asmuni⁶

2310413012@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2310413034@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2310413037@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2310413086@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴,
fatkhuri@upnvj.ac.id⁵, mukhamadbusroa@upnvj.ac.id⁶

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

ABSTRAK

Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada tahun 2017 melalui mekanisme hukum Perppu Ormas menandai tertutupnya peluang politik formal bagi gerakan pengusung khilafah di Indonesia. Namun, hilangnya legalitas organisasi ternyata tidak serta-merta mematikan eksistensi ideologisnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi strategi gerakan HTI pasca-pembubaran dan implikasinya terhadap ketahanan ideologi Pancasila. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research), penelitian ini membedah dinamika adaptasi gerakan dalam kurun waktu 2020–2025 melalui kerangka Teori Struktur Peluang Politik (Political Opportunity Structure). Hasil penelitian menunjukkan bahwa HTI telah bermetamorfosis dari organisasi massa terbuka menjadi gerakan resistensi hibrida yang memadukan "gerilya maya" di media sosial dan konsolidasi jaringan klandestin (bawah tanah) melalui komunitas informal. Gerakan ini melakukan kamuflase narasi dengan membungkai isu ketidakadilan tanpa menampilkan simbol organisasi secara vulgar, yang secara efektif mengerosi identitas nasional di kalangan generasi muda. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan represif negara memiliki keterbatasan dalam membendung arus ideologi cair ini, sehingga diperlukan pergeseran strategi dari sekadar pelarangan legal menuju penguatan kontra-narasi holistik dan moderasi beragama di ruang publik digital.

Kata Kunci: HTI, Pasca-Pembubaran, Resistensi Digital, Pancasila, Political Opportunity Structure.

PENDAHULUAN

Dinamika politik Indonesia saat ini dihadapkan pada tantangan besar dari gerakan-gerakan transnasional yang membawa narasi ideologis global dan berusaha bersaing dengan nilai-nilai lokal. Salah satu aktor yang paling menonjol dalam isu ini adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Gerakan ini tidak hanya fokus pada dakwah, tetapi juga punya tujuan politik yang tegas: menegakkan Khilafah Islamiyah. Kehadirannya memicu ketegangan serius dengan konsep negara bangsa (nation-state) yang menjadi dasar Indonesia. Pengaruh HTI bahkan menyentuh aspek identitas nasional, karena loyalitas ideologis pengikutnya diarahkan melampaui batas negara demi cita-cita persatuan umat global (Nandari, et al., 2024). Jadi, benturan yang terjadi bukan sekadar beda pandangan politik, tetapi perdebatan mendasar tentang sumber legitimasi negara.

Pemerintah merespons ancaman ideologis tersebut dengan membubarkan HTI pada 2017. Namun, langkah hukum ini tidak otomatis menghentikan penyebaran gagasan mereka. Justru setelah pembubaran, terlihat bahwa HTI mampu beradaptasi dan tetap bergerak dengan cara-cara baru. Dinamika HTI pasca 2017 menunjukkan bahwa mereka tetap eksis meski tanpa status legal, dan transformasi ini membawa dampak jangka panjang bagi stabilitas politik serta kualitas demokrasi di Indonesia (Nurhidayah, et al., 2025). HTI berubah dari organisasi formal menjadi gerakan yang lebih cair dan menyebar melalui jaringan informal serta media digital dengan pola gerak yang lebih tersembunyi.

Untuk membaca fenomena ini, perlu dilihat bagaimana ideologi global berinteraksi dengan struktur politik lokal. Adaptasi HTI tidak bisa dilepaskan dari strategi narasi yang

mereka bangun terutama narasi tandingan tentang gagalnya demokrasi sekaligus mempromosikan khilafah sebagai solusi. Ketegangan antara narasi nasionalisme negara dan wacana HTI memperlihatkan bahwa resistensi terhadap negara dilakukan melalui produksi wacana alternatif yang terus mereka dorong (Aswar, 2022). Selain itu, kemampuan bertahan HTI juga dipengaruhi oleh hubungan global-lokal yang kuat. Akar dan jaringan transnasional HTI membuat mereka tetap bisa memperkuat dukungan lokal meski berada di bawah tekanan politik dalam negeri (Rijal, 2022).

Walaupun banyak studi sudah membahas aspek legal dari pembubaran HTI, masih ada celah penelitian terkait strategi adaptasi yang mereka lakukan setelah kehilangan ruang formal. Penelitian ini berargumen bahwa tantangan HTI terhadap Pancasila kini bergeser dari yang bersifat institusional menjadi kultural dan digital dua ranah yang jauh lebih sulit dipantau. Ideologi transnasionalisme yang mereka bawa kini bergerak sebagai gerakan pemikiran yang beredar di ruang sosial baru, sehingga butuh kewaspadaan yang lebih luas, tidak hanya pendekatan hukum (Halimi & Yusufa, 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana HTI bertransformasi sebagai gerakan transnasional setelah pembubaran tahun 2017 dan apa implikasinya terhadap ideologi Pancasila. Artikel ini akan membahas bagaimana HTI membentuk ulang strategi mereka di ranah digital dan komunitas informal, serta bagaimana narasi khilafah dikemas ulang agar tetap relevan dalam menantang identitas kebangsaan Indonesia.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan (library research) untuk memahami bagaimana Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bertransformasi setelah pembubarannya pada tahun 2017. Alih-alih berfokus pada lokasi fisik tertentu, penelitian ini diarahkan pada ruang digital dan perkembangan wacana yang muncul selama lima tahun terakhir (2020–2025). Fokus pada ranah digital dipilih karena ruang virtual saat ini menjadi arena gerilya utama bagi eks-HTI dalam menyebarkan ideologi khilafah dan mempertahankan jaringan pendukung tanpa harus bersinggungan langsung dengan aparat negara (Setia & Rahman, 2021). Dengan demikian, objek yang diteliti bukanlah aktivitas fisik, melainkan teks, dokumen, dan literatur yang mencerminkan proses adaptasi gerakan tersebut.

Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan menelusuri berbagai sumber primer seperti artikel jurnal ilmiah yang terakreditasi dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan topik penelitian. Pemilihan literatur terbaru menjadi sangat penting, terutama karena mantan anggota HTI diketahui terus memodifikasi strategi dakwah mereka baik melalui medium digital maupun pendekatan interpersonal yang lebih tertutup sebagai upaya menghindari pembatasan negara (Firdaus & Asror, 2024). Seluruh data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) yang meliputi proses reduksi data, penyajian temuan secara naratif, dan penarikan kesimpulan. Analisis ini dilakukan untuk melihat bagaimana perubahan narasi HTI membentuk tantangan baru terhadap ideologi Pancasila dalam konteks sosial-politik Indonesia saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adaptasi, Resistensi, dan Kamuflase Gerakan: Transformasi HTI di Era Digital Pasca-Pembubaran

Pembubaran HTI pada tahun 2017 melalui Perppu Ormas ternyata tidak membuat gerakan ini hilang begitu saja. Kebijakan negara yang bersifat represif justru mengubah kondisi politik yang sebelumnya cukup terbuka bagi HTI menjadi sangat sempit. Karena ruang legal mereka ditutup, HTI mulai menerapkan apa yang disebut sebagai resistensi adaptif. Artinya, mereka tidak lagi bergerak

secara terang-terangan, tetapi menyesuaikan strategi dengan kondisi baru melalui pola gerakan yang lebih tersembunyi. Penelitian menunjukkan bahwa mereka mengombinasikan aktivitas terbuka dan aktivitas bawah tanah untuk menghindari tekanan negara (Herdiansah, 2023). Dalam kerangka teori struktur peluang politik, kondisi ini menunjukkan bahwa gerakan ideologis tidak langsung hilang saat ditekan, melainkan berubah bentuk menjadi lebih fleksibel dan sulit dilacak.

Perubahan paling jelas terlihat pada perpindahan ruang gerakan dari aktivitas fisik ke ruang digital. Media sosial kini menjadi arena utama bagi HTI untuk membangun pengaruh. Berbagai penelitian terbaru menemukan bahwa pasca-pembubarannya, mereka menggunakan media sosial sebagai alat utama untuk membentuk opini publik, menyusup ke organisasi lain, hingga melakukan kaderisasi secara diam-diam (Ma'mur dkk., 2025). Strategi infiltrasi ini menunjukkan bahwa mereka belajar menyesuaikan diri misalnya tidak lagi menonjolkan simbol-simbol khas HTI yang mudah dikenali, tetapi membungkus narasi khilafah dalam isu-isu umum seperti ketimpangan ekonomi atau masalah moral agar lebih mudah diterima masyarakat luas.

Transformasi ini juga terjadi di tingkat akar rumput, terutama melalui peran kelompok tertentu seperti perempuan. Studi di Kediri menunjukkan bahwa pengajian eks-HTI kini dikelola secara lebih tertutup oleh komunitas perempuan, dengan cara mengundang jamaah melalui pendekatan personal. Strategi ini terbukti menjaga ideologi HTI tetap berjalan meskipun secara formal gerakan tersebut sudah dibubarkan. Bahkan, penelitian itu menemukan bahwa di level lokal, mereka masih memperlihatkan sikap penolakan terhadap Pancasila, tetapi dilakukan dalam ruang domestik dan komunitas keagamaan yang sifatnya tertutup (Hasanah, 2024). Ini menunjukkan bahwa resistensi ideologis tidak lagi muncul dalam bentuk politik formal, melainkan bergerak sebagai budaya dan keyakinan yang ditanamkan dari mulut ke mulut.

Gabungan antara gerilya digital di tingkat nasional dan sel-sel kecil yang tertutup di tingkat lokal menciptakan tantangan baru bagi Pancasila. Jika dulu yang dihadapi negara adalah organisasi besar dengan struktur yang jelas, kini negara harus menghadapi narasi yang cair, tidak berbentuk, dan sulit dilacak. Tantangan ideologis ini semakin kompleks karena HTI bergerak secara tidak terlihat menyebarluaskan ideologi melalui konten digital yang persuasif dan jaringan sosial yang eksklusif. Dalam kondisi ini, ancaman terhadap Pancasila bukan lagi datang dari organisasi resmi, tetapi dari aliran gagasan yang terus beredar dan menggerus kesadaran publik tanpa disadari.

Kontestasi Wacana Digital dan Erosi Identitas Kebangsaan: Dampaknya terhadap Ketahanan Pancasila

Perpindahan HTI ke ruang digital bukan sekadar perubahan lokasi gerakan, tetapi strategi baru untuk mengatur ulang cara mereka berdakwah dan mempengaruhi cara masyarakat memahami negara. Dalam perspektif Teori Struktur Peluang Politik, ketika ruang politik formal benar-benar tertutup, media sosial menjadi peluang baru yang bisa dimanfaatkan untuk tetap bergerak. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa HTI menggunakan platform seperti Facebook untuk menyebarluaskan narasi tandingan. Contohnya terlihat pada kampanye Ide Khilafah yang dikemas secara lebih modern lewat akun seperti Buletin Dakwah Kaffah. Mereka mempromosikan gagasan Islam Kaffah sebagai satu-satunya solusi bagi masalah bangsa, tanpa memakai simbol-simbol yang berpotensi membuat mereka diblokir (Jamilah & Rafii, 2022). Strategi ini menunjukkan bahwa HTI sedang berusaha membangun hegemoni baru di dunia maya dengan cara menggiring opini publik misalnya dengan menampilkan demokrasi sebagai sistem gagal dan menawarkan khilafah sebagai solusi yang tampak "wajar" dan sesuai ajaran agama.

Strategi ini menjadi lebih berbahaya karena bekerja lewat jalur kultural yang sulit disentuh hukum. HTI tidak bubar secara ideologis; mereka bertahan lewat jaringan komunitas kecil yang tidak mencolok, seperti kelompok perempuan dan majelis taklim tertutup. Penelitian di Kediri menunjukkan bahwa perempuan eks-HTI memiliki tingkat ketahanan ideologis yang tinggi. Mereka tetap menolak Pancasila dan menyebarluaskan ajaran khilafah melalui jaringan keluarga yang sifatnya privat sehingga tidak mudah terdeteksi negara (Hasanah, 2024). Ini menjelaskan bahwa penolakan terhadap Pancasila kini tidak lagi muncul secara terbuka, melainkan berkembang sebagai resistensi budaya yang tertanam kuat dan berlangsung dalam ruang-ruang yang tidak kasatmata.

Implikasi dari perubahan strategi ini sangat serius karena menciptakan kondisi sosial-politik yang tidak stabil. Narasi yang terus diproduksi oleh jaringan eks-HTI menimbulkan polarisasi baru dalam masyarakat. Akibatnya, sebagian warga mulai terbelah antara loyalitas pada negara dan

kecenderungan mengikuti doktrin keagamaan yang dipolitisasi. Bukti empiris menunjukkan bahwa isu dan narasi yang terus disebarluaskan eks-HTI memicu ketegangan sosial dan menjadi ancaman nyata bagi stabilitas politik Indonesia, sehingga negara harus bekerja lebih keras menjaga keragaman ideologi agar tidak berujung pada konflik atau perpecahan (Naila dkk., 2024). Pada akhirnya, Pancasila kini menghadapi ancaman asimetris: bukan dari kekerasan fisik, tetapi dari narasi digital yang secara perlahan mengikis identitas kebangsaan lewat konten yang terus disebarluaskan setiap hari.

Evaluasi Respons Negara: Dari Pendekatan Represif Menuju Kontra-Narasi Holistik

Analisis terhadap dinamika pasca-pembubaran HTI menunjukkan bahwa kebijakan represif negara melalui Perppu Ormas berfungsi hanya sebagai “terapi kejut” yang bersifat sementara. Meskipun langkah tersebut efektif untuk membekukan struktur organisasi secara formal, berbagai temuan lapangan memperlihatkan bahwa aktivitas ideologis gerakan ini tetap berlanjut. Penelitian Haq (2023) menegaskan bahwa meskipun HTI telah dilarang secara hukum, proses rekrutmen dan penyebaran ide khilafah tidak berhenti, melainkan bermetamorfosis menjadi gerakan yang lebih cair, fleksibel, dan sulit dideteksi. Temuan ini menunjukkan keterbatasan mendasar dari pendekatan keamanan (security approach) negara dapat membubarkan organisasi, tetapi tidak serta-merta memutus keyakinan ideologis yang kini beroperasi secara klandestin dan terdesentralisasi di ruang privat.

Keterbatasan lain yang sangat krusial terlihat pada ketidaksiapan negara dalam menghadapi “perang wacana” di media sosial. Ketika kelompok radikal mampu memproduksi konten propaganda secara kreatif dan masif terutama yang menyasar psikologi anak muda strategi komunikasi pemerintah cenderung stagnan dalam pola komunikasi birokratis yang tidak menarik bagi publik digital. Studi Rustandi (2020) menunjukkan bahwa memblokir situs atau men-take down akun hanyalah solusi jangka pendek; strategi kontra-narasi yang efektif harus memanfaatkan teknik pembingkaihan (framing) yang persuasif, narasi yang relatable, serta format konten yang sesuai dengan gaya komunikasi generasi internet. Tanpa inovasi komunikasi publik, ruang digital akan terus didominasi oleh narasi transnasional yang memposisikan khilafah sebagai alternatif atas problem politik dan sosial Indonesia.

Oleh karena itu, respons negara ke depan perlu bergerak melampaui pendekatan represif menuju strategi penguatan imunitas ideologi masyarakat. Pendekatan yang paling relevan ialah integrasi nilai-nilai Pancasila dengan konsep Moderasi Beragama. Sejumlah penelitian membuktikan bahwa pengarusutamaan Pancasila dan moderasi beragama merupakan strategi preventif yang efektif dalam menangkal radikalisme, karena pendekatan ini tidak mempertentangkan agama dengan negara, tetapi menegaskan bahwa religiusitas dan nasionalisme dapat berjalan secara harmonis (Wulansari & Kiftiyah, 2024). Dalam konteks ini, negara perlu mengambil peran sebagai fasilitator dialog dan rekonsiliasi, bukan semata-mata aktor represif. Pendekatan inklusif ini penting untuk merangkul kembali kelompok-kelompok yang terpapar radikalisme, sekaligus mengurangi potensi alienasi sosial yang selama ini justru memperkuat militansi ideologis mereka.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada tahun 2017 berhasil mematikan struktur formal organisasi namun gagal menghentikan penyebaran ideologinya yang justru bermetamorfosis menjadi gerakan resistensi digital dan klandestin. Temuan ini menjawab rumusan masalah dengan menunjukkan bahwa transformasi gerakan dari mobilisasi fisik ke "gerilya maya" dan jaringan informal menciptakan ancaman asimetris baru yang mengerosi identitas nasional secara kognitif. Meskipun respons negara memiliki kelebihan dalam ketegasan instrumen hukum yang efektif menutup peluang politik fisik, terdapat kekurangan fundamental berupa ketidaksiapan menghadapi perang wacana di ruang siber, di mana narasi kamuflase eks-HTI sering kali lebih dominan dibandingkan kontra-narasi pemerintah. Oleh karena itu, tantangan masa depan tidak lagi dapat diselesaikan sekadar dengan larangan legalitas, melainkan menuntut strategi holistik yang memadukan penegakan hukum dengan penguatan literasi ideologi dan moderasi beragama di ruang publik digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Annissa, J., & Putra, R. W. (2022). Radikalisme agama dan tantangan identitas nasional di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 1211–1218.
- Aswar, H. (2022). Nationalism narrative and the state policy on Hizbut-Tahrir in Indonesia. *Nation State: Journal of International Studies*, 5(2), 107-118.
- Firdaus, R. M., & Asror, A. (2024). Strategi dakwah mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia di Kabupaten Jember pasca dibubarkan pemerintah Republik Indonesia. *ICON: Islamic Communication and Contemporary Media Studies*, 3(1), 33–46.
- Gusniyanda, E. M., Amanda, A. F., Andriyani, R., & Azzahra, D. (2025). Tantangan identitas nasional dalam perspektif Pancasila di tengah arus globalisasi. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(1), 1279–1282.
- Halimi, D. N., & Yusufa, U. (2025). Ideologi trans-nasionalisme sebagai gerakan: Hizbut Tahrir Indonesia. *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(2).
- Hasanah, U. (2024). Reseliensi perempuan eks-HTI terhadap ideologi Pancasila di Kediri. *IJHSS: Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 5(1), 18–30.
- Haq, A. M. I. (2023). Hizbut Tahrir Indonesia's (HTI) Efforts the Idea of Caliphate and Recruit Members after being Banned by the Government. *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies*, 7(1), 72–86.
- Herdiansah, A. (2023). Beyond Disbandment of Islamist Organization: Examining the Adaptive Resistance of Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). *Jurnal Wacana Politik*, 8(2), 162-172.
- Jamilah, J., & Rafii, M. (2022). Kampanye ide khilafah: Studi manajemen dakwah akun Facebook Buletin Dakwah Kaffah. *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman*, 8(1), 1–22.
- Ma'mur, I., Hidayani, S., Luthfi, M., & Mubarok, M. G. A. (2025). Dynamics Post-Hizb ut-Tahrir Indonesia (HTI) Dissolution: Activist Reactions and Public Response. *International Journal of Islamic Khazanah*, 15(2), 87–101.
- McAdam, D., McCarthy, J. D., & Zald, M. N. (Eds.). (1996). Comparative perspectives on social movements: Political opportunities, mobilizing structures, and cultural framings. Cambridge University Press.
- Naila, N., Imaniry, S., Ramadhanty, A., & Ummah, A. (2024). Tantangan terhadap stabilitas politik dan sosial Indonesia: Dampak kontroversi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(2), 1–6.
- Nandari, T., Fitriah, M., Bayu, B. P., & Ummah, A. (2024). Dinamika gerakan transnasionalisme Islam: Pengaruh kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terhadap identitas nasional. *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global*, 5(1), 1-12.
- Nurhidayah, I. A., Afiana, L., Pangestu, Y. I., Qolbi, M. H., & Qomariyah, Q. (2025). Dinamika Hizbut Tahrir Indonesia: Sejarah, ideologi, dan dampaknya terhadap stabilitas politik serta demokrasi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(4), 176-190.
- Tarrow, S. G. (1998). Power in movement: Social movements and contentious politics (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Rijal, S. (2022). The origins of Hizbut Tahrir Indonesia: Global and local interactions. *Islamic Studies Review*, 1(1), 110-127.
- Rustandi, R. (2020). Analisis Framing Kontra Narasi Terorisme dan Radikalisme di Media Sosial. *KOMUNIKATIF: Jurnal Ilmiah Komunikasi*, 9(2), 134-153. (Artikel ini membahas strategi komunikasi dan framing di media sosial).
- Setia, P., & Rahman, M. T. (2021). Kekhilafahan Islam, globalisasi dan gerilya maya: Studi kasus Hizbut Tahrir Indonesia. *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, 9(2), 241–264.
- Wardani, A. K., & Riwanto, A. (2020). Analisis pembubaran organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia dalam perspektif negara hukum yang bebas berserikat. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 8(2), 1–15.
- Wulansari, F., & Kiftiyah, A. (2024). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dan Moderasi Agama Sebagai Upaya Menangkal Gerakan Radikal di Indonesia. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 4(1), 91–104.